



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03
BADAN PERADILAN UMUM

www.id.pn-sangatta.go.id
pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com
(0549) 21324

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi

SANGATTA – KUTAI TIMUR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 31 Januari 2024

Sekretaris,



Arini Widiastuti, S.IP.
NIP 197409182006042001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	18
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	20
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	21
F. Pengungkapan Penting Lainnya	25
G. Lampiran Lampiran	28



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 31 Januari 2024

Sekretaris,



Arini Widiastuti, S.IP.
NIP 197409182006042001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 36,808,500 atau mencapai 152 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp 24.221.000

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 121,991,000 atau mencapai 99,98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 122.010.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0 yang seluruhnya merupakan Aset Lancar.

Tidak Terdapat Nilai Kewajiban, utang yang belum ditagihkan, uang muka KPPN dan utang jangka pendek lainnya. Dan Ekuitas sebesar Rp 0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 36,808,500 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 127,140,153 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(70,831,653) Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(90,331,653).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp 318.000 dikurangi Defisit-LO sebesar (90,331,653) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 90,013,653 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
 SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
I. Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
1. Pajak Dalam Negeri	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Pajak Perdagangan Internasional	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	24,221,000.	36,808,500.	12,587,500.	152	20,015,000.	26,902,500.	6,887,500.	134.
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
3. Pendapatan BLU	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	24,221,000.	36,808,500.	12,587,500.	152	20,015,000.	26,902,500.	6,887,500.	134.
III. Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	24,221,000.	36,808,500.	12,587,500.	152	20,015,000.	26,902,500.	6,887,500.	134.
B. Belanja Negara	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
I. Belanja Pemerintah Pusat	122,010,000.	121,991,000.	(19,000.)	100	121,392,000.	116,771,500.	(4,620,500.)	96.
1. Belanja Pegawai	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Belanja Barang	122,010,000.	121,991,000.	(19,000.)	100	121,392,000.	116,771,500.	(4,620,500.)	96.
3. Belanja Modal	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
5. Belanja Subsidi	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
6. Belanja Hibah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
7. Belanja Bantuan Sosial	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
8. Belanja Lain-lain	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
1. Transfer ke Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2023

a. Dana Perimbangan	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
1. Dana Transfer Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
a. Dana Bagi Hasil	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Alokasi Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Dana Transfer Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Insentif Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
c. Dana Keistimewaan DIY	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
d. Dana Otonomi Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Dana Desa	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
3. Hibah Kepada Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	122,010,000.	121,991,000.	(19,000.)	100	121,392,000.	116,771,500.	(4,620,500.)	96.
C. PEMBIAYAAN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.

II. NERACA

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

KEMENTERIAN : (005) MAHKAMAH AGUNG
 NEGARA/LEMBAGA : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 WILAYAH/PROVINSI : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATA
 SATUAN KERJA :

NAMA PERKIRAAN			JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
1	2	3	2022	Jumlah	%	
ASET						
ASET LANCAR						
Persediaan	0.	318,000		(318,000)	(100.00)	
JUMLAH ASET LANCAR	0.	318,000		(318,000)	(100.00)	
JUMLAH ASET	0.	318,000		(318,000)	(100.00)	

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2023

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	0.	318,000	(318,000)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0.	318,000	(318,000)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0.	318,000	(318,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	318,000	(318,000)	(100.00)

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

KEMENTERIAN : (005) MAHKAMAH AGUNG
NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Penghasilan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Cukai	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Lainnya	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Masuk	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Keluar	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0.	0.	0.	0.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	36,808,500.	26,902,500.	9,906,000.	36.822
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	36,808,500.	26,902,500.	9,906,000.	36.822
PENDAPATAN HIBAH	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan	36,808,500.	26,902,500.	9,906,000.	36.822
BEBAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Beban Pegawai	0.	0.	0.	0.
Beban Persediaan	33,949,153.	31,732,924.	2,216,229.	6.984
Beban Barang dan Jasa	73,391,000.	67,654,000.	5,737,000.	8.48
Beban Pemeliharaan	0.	0.	0.	0.
Beban Perjalanan Dinas	19,800,000.	23,400,000.	(3,600,000.)	(15.385)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0.	0.	0.	0.
Beban Bunga	0.	0.	0.	0.
Beban Subsidi	0.	0.	0.	0.
Beban Hibah	0.	0.	0.	0.
Beban Bantuan Sosial	0.	0.	0.	0.
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.	0.	0.	0.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.	0.	0.	0.
Beban Transfer	0.	0.	0.	0.
Beban Lain-Lain	0.	0.	0.	0.
JUMLAH BEBAN	127,140,153.	122,786,924.	4,353,229.	3.545
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(90,331,653.)	(95,884,424.)	5,552,771.	(5.791)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(90,331,653.)	(95,884,424.)	5,552,771.	(5.791)
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
Beban Luar Biasa	0.	0.	0.	0.
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT - LO	(90,331,653.)	(95,884,424.)	5,552,771.	(5.791)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA :
(662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	318,000.	118,000.	200,000.	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(90,331,653.)	(95,884,424.)	5,552,771.	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0.	0.	0.	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.	0.	0.	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	90,013,653.	96,084,424.	(6,070,771.)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(318,000.)	200,000.	(518,000.)	-
EKUITAS AKHIR	0.	318,000.	(318,000.)	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH No 01 – Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-

praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah sebagai berikut :

Pendapatan **(1) Pendapatan-LRA**

-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan **(2) Pendapatan-LO**

-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan

atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp310.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih **(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Triwulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Triwulan selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp36,808,500*

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36,808,500 atau 152 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp24.221.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta seluruhnya merupakan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, pendapatan ongkos perkara, pendapatan uang meja leges.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	Rp24.221.000	36,808,500	152
Jumlah	Rp24.221.000	36,808,500	152

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 7 persen dibandingkan 31 Desember 2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) Rp	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	36,808,500	26,902,500	9,906,000	18
Jumlah	36,808,500	26,902,500	9,906,000	18

B2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara Rp.
121,991,000

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp121,991,000 atau 99,98 persen dari anggaran belanja sebesar Rp121.010.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang	122.010.000	121,991,000	99,98
Jumlah Belanja Kotor	122.010.000	121,991,000	99,98
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah	122.010.000	121,991,000	99,98

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 88.169.000 dan Rp86.059.000.

Belanja Barang
Rp121,991,000

URAIAN	REALISASI 31 Des 2023	REALISASI 31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	121,991,000	116,771,500	3,98
Jumlah Belanja Barang	121,991,000	116,771,500	3,98

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 03 654446629871000	0	0

Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara Penerima Rp0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerima per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo kas lainnya atau setara kas Rp0

C.3. Saldo kas lainnya atau setara kas

Saldo kas lainnya atau setara kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Persediaan Rp0.

C.4. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp318.000

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	0	318.000
Jumlah	0	318.000

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.5. Uang Muka dari KPPN

Tidak terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang

muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas Rp0

C.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp318.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp36,808,500

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 36,808,500 dan Rp26,902,500.

*Rincian Pendapatan
Per 31 Desember 2023 dan Desember 2022*

Uraian	31 DES 2023	31 DES 2022
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	36,808,500	26,902,500
Jumlah	36,808,500	26,902,500

Beban
Persediaan
Rp33,949,153

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33,949,153 dan Rp 31,732,924 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang
dan Jasa
Rp73,391,000

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp73,391,000 dan Rp67,654,000 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban
Perjalanan Dinas
Rp19,800,000

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19,800,000 dan Rp23,400,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2022 dan 2023

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,800,000	23,400,000
Jumlah	19,800,000	23,400,000

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp0

D.5. Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp318.000

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp318.000 dan Rp.118.000.

Defisit LO
(90,331,653)

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (90,331,653) dan (Rp. (95,884,424)). Defisit LO merupakan selisih /kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

E.3.

Penyesuaian
Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 . Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Koreksi Nilai Saldo Awal	0
Jumlah	0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas Rp
90,013,653

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 90,013,653 dan Rp 96,084,424

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp 36,808,500 sedangkan DKEL sebesar Rp 121,991,000

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.831.153 dan tidak terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Tidak terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas Akhir Rp0

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp318.000

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. PENUNGGAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian/Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik nama PN) dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

NAMA SATKER	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%	SATUAN OUTPUT STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS	%
PN Sangatta	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp2.010.000	Rp2.010.000	100	3 Pkr	3 Pkr	3	100
PN Sangatta	Perkara Hukum Perseorangan	Rp.19.200.000	Rp.19.200.000	100	40 Orang	40Orang	40	100

F.2. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.3. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Triwulan lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.4. INFORMASI AKRUAL

Tidak terdapat informasi akrual pada laporan keuangan per 31 Desember 2023

F.5. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 654446629871000 a.n. BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember sebesar Rp0.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 0563-000742-31-7 a.n. RPL 046 PN SANGATA UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1,984,392,235

F.6. REVISI DIPA

Hingga tanggal 31 Desember 2023, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah melakukan 1 kali revisi.

1. Revisi 1 pada tanggal 10 Oktober 2023.

F.7. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 31 Desember 2023, Pengadilan Negeri Sangatta tidak ada melakukan Rlat SPM, SP2D, SSBP Dan SSPB.

F.8. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2023, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri

Sangatta Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Arini Widiastuti, S.IP.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Arini Widiastuti, S.IP.
Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	:	Muhamad Rodansa, S.I.P.
Bendahara Pengeluaran	:	Yunita Padma Dewi, A.Md.A.B.
Bendahara Penerima	:	Aisyah, S.H., M.H.

G . lampiran lampiran



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN
Nomor : 1630/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.1/XII/2023

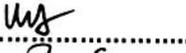
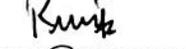
Nama Satker : Pengadilan Negeri Sangatta
Kode Satker : 662987
UAPPB-W : Mahkamah Agung
UAPPB-E1 : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pada hari ini, **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh tiga**, bertempat di Pengadilan Negeri Sangatta, Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Panitia Opname Fisik Persediaan :

- Nama : **Muhamad Rodansa, S.I.P.**
NIP. : 19920808201903 1 006
Jabatan : Ketua
- Nama : **Revando Lumban Raja, S.Komp.**
NIP. : 19910829202012 1 003
Jabatan : Anggota
- Nama : **Yunita Padma Dewi, A.Md,A.B.**
NIP. : 19940607202012 2 005
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik barang persediaan Semester II Tahun 2023 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam hasil Opname Fisik. Demikian Berita Acara Opname fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (opname fisik) :

- Muhamad Rodansa, S.I.P. 
- Revando Lumban Raja, S.Komp. 
- Yunita Padma Dewi, A.Md.,A.B, 

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Sangatta




ARINI WIDIASTUTI, S.I.P.
NIP. 197409182006042001

**LAPORAN INVENTARISASI BARANG PERSEDIAAN
(STOCK OPNAME)**

Nama Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Sangatta
 Kode Satuan Kerja : 662987
 UAPPBW : Kalimantan Timur
 UAPPB-E1 : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

NO	KODE BARANG		NAMA BARANG	KUANTITAS BARANG			KONDISI BARANG			KETERANGAN
	Kode Sub Sub Kelompok Barang	Kode Barang		Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik	Selisih	B	R	U	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Mengetahui

Kuasa Pengguna Barang
 Pengadilan Negeri Sangatta


 ARINI WIDIASTUTI, S.I.P.
 NIP. 197409182006042001

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode dan Nama UAKPA : (662987) Pengadilan Negeri Sangatta
 Kode dan Nama UAPPAW : (1600) Kalimantan Timur
 Kode dan Nama Eselon 1 : (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
 Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	✓		Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
a.	Pagu/DIPA		✓	Tidak
b.	Estimasi PNBP		✓	Tidak

	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	e. Pendapatan		✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	g. Kas BLU		✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
	i. Kas Hibah		✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak
	Rekon Internal			
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
			✓	Tidak
	Daftar MONSAKI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		✓	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/19/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak

3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		✓	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A	N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		0	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		0	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A	N/A	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	N/A	N/A	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		✓	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2023 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	✓		Ya

6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	✓		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx)		✓	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	✓		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	✓		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	N/A	N/A	Ya
Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST				
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	✓		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		✓	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	✓		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		✓	Ya/Tidak
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya

1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual			Ya/Tidak

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Deskripsi	No Akun	Debet	Kredit
-----------	---------	-------	--------

Mengetahui
 Kepala Penyusun LKKL,

Ardi Widiantuti, S.IP.
 NIP. 197405182006042001

Sangatta, 31 Januari 2024
 Penelaah,

Muhamad Rodansa, S.I.P.
 NIP. 199208082019031006



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 30/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 30/01/24 3:02 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	0	318,000	(318,000)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	318,000	(318,000)	(100.00)
JUMLAH ASET	0	318,000	(318,000)	(100.00)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	0	318,000	(318,000)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	318,000	(318,000)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	318,000	(318,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	318,000	(318,000)	(100.00)

Keterangan :
FINAL

Kab. Kutai Timur, 30 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662987

Tgl Data : 30/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 30/01/24 3:02 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	122,010,000	121,991,000	(19,000)	100	121,392,000	116,771,500	(4,620,500)	96
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Kab. Kutai Timur, 30 Januari 2024

Panglima Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



ARINI WIDIASTUTI
197409182006042001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 30/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 30/01/24 3:02 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	318,000	118,000	200,000	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(90,331,653)	(95,884,424)	5,552,771	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	90,013,653	96,084,424	(6,070,771)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(318,000)	200,000	(518,000)	-
EKUITAS AKHIR	0	318,000	(318,000)	-

Keterangan :

FINAL

Kab. Kutai Timur, 30 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARINI WIDIASTUTI

197409182006042001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 30/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 30/01/24 3:02 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	36,808,500	26,902,500	9,906,000	36.822
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	36,808,500	26,902,500	9,906,000	36.822
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	36,808,500	26,902,500	9,906,000	36.822
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	33,949,153	31,732,924	2,216,229	6.984
Beban Barang dan Jasa	73,391,000	67,654,000	5,737,000	8.48
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	19,800,000	23,400,000	(3,600,000)	(15.385)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 30/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 30/01/24 3:02 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	127,140,153	122,786,924	4,353,229	3.545
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(90,331,653)	(95,884,424)	5,552,771	(5.791)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(90,331,653)	(95,884,424)	5,552,771	(5.791)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(90,331,653)	(95,884,424)	5,552,771	(5.791)

Keterangan :

FINAL

Kata Kunci: 30 Januari 2024

Penanggung jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARINI WIDIASTUTI

197409182006042001

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)

DITJEN BADAN PERADILAN UMUM (03)

PENGADILAN NEGERI SANGATTA (662987)

Rekening Induk : RKK DITJEN BADILUM O (023001xxxxxx304)

Virtual Account : 654446629871000 | BPG 046 PN SANGATTA 03

Periode : 01-01-2023 s/d 31-12-2023

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-02-08	11:37:11	10888041	Penyediaan Uang Persediaan RM Satker PENGADILAN NEGERI SANGATTA Tahun Anggaran 2023 230461301001037000001	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	SPAN	
2023-02-10	16:28:28	10940487	YUNITA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-02-28	10:21:28	11190265	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 230461301002413000001	0,00	0,00	6.885.500,00	6.885.500,00	SPAN	
2023-03-01	10:03:23	11212197	YUNITA	6.885.500,00	6.885.500,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-03-08	10:09:46	11356762	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301003146000001	0,00	0,00	9.020.000,00	9.020.000,00	SPAN	
2023-03-08	13:43:16	11366533	YUNITA PADMA DEWI	9.020.000,00	9.020.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-04-03	15:28:32	12091153	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301004992000001	0,00	0,00	6.377.500,00	6.377.500,00	SPAN	
2023-04-05	12:00:30	12154542	YUNITA	6.377.500,00	6.377.500,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-05-15	15:09:18	13390397	Peggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301008251000001	0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	SPAN	
2023-05-16	11:23:05	13413346	PENKYY FADLI	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-05-31	10:31:19	13848179	Peggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301009266000001	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	SPAN	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-06-05	13:32:12	13947514	yunita	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-06-16	10:30:51	14420741	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301010897000001	0,00	0,00	5.062.500,00	5.062.500,00	SPAN	
2023-06-20	14:14:15	14521193	yunita padma dewi	5.062.500,00	5.062.500,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-06-23	13:33:44	14610747	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301011537000001	0,00	0,00	9.312.000,00	9.312.000,00	SPAN	
2023-06-26	09:18:03	14658267	yunita	9.312.000,00	9.312.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-07-20	11:20:07	15390859	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301013570000001	0,00	0,00	6.029.000,00	6.029.000,00	SPAN	
2023-07-25	12:50:45	15536505	yunita	6.029.000,00	6.029.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-07-28	15:07:45	15690816	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301014475000001	0,00	0,00	8.890.000,00	8.890.000,00	SPAN	
2023-08-01	14:00:05	15798972	YUNITA PADMA DEWI	8.890.000,00	8.890.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-08-21	08:52:55	16495743	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301016260000001	0,00	0,00	8.310.000,00	8.310.000,00	SPAN	
2023-08-24	13:24:26	16618163	YUNITA PATMA DEWI	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-08-29	10:18:51	16745662	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301016856000001	0,00	0,00	8.032.500,00	8.032.500,00	SPAN	
2023-08-30	09:04:19	16780742	PENARIKAN TUNAI PN	8.032.500,00	8.032.500,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-09-19	12:10:43	17472064	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301018784000001	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	SPAN	
2023-09-19	13:35:44	17475397	PENARIKAN TUNAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-10-12	09:02:26	18270992	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301020795000001	0,00	0,00	6.184.500,00	6.184.500,00	SPAN	
2023-10-12	13:11:51	18296484	yunita	6.184.500,00	6.184.500,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-10-31	09:07:32	19068789	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301022397000001	0,00	0,00	9.280.000,00	9.280.000,00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-11-01	07:46:03	19114875	YUNITA PADMA DEWI	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-11-06	10:07:25	19398956	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301022897000001	0,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	SPAN	
2023-11-06	12:30:34	19419550	YUNITA PADMA DEWI	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-11-30	10:17:24	21610184	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301025784000001	0,00	0,00	6.963.000,00	6.963.000,00	SPAN	
2023-12-01	07:54:36	21699631	YUNITA	6.963.000,00	6.963.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		125.946.500,00	125.946.500,00			
			Saldo Akhir				0,00		